



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

Akuntansi menurut Kieso (2015) terdapat tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari organisasi terhadap pengguna informasi. Setelah mengidentifikasi kejadian ekonomi yang relevan dilakukan pencatatan setiap kejadian untuk menyediakan riwayat dari aktifitas keuangan. Selanjutnya, informasi yang telah dikumpulkan dikomunikasikan kepada pengguna dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut IAI (2016) pada PSAK tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Dalam laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.

Menurut IAI (2016) pada PSAK No.1 laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan akhir periode

Dalam laporan posisi keuangan terdapat aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Aset yang dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar adalah aset yang diperuntukan untuk diperdagangkan, aset yang dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal dan aset yang merupakan kas atau setara kas. Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang tidak diperuntukkan untuk jual-beli, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Liabilitas yang dapat diklasifikasikan dalam liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang diperkirakan entitas akan dapat diselesaikan dalam satu siklus operasi normal, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk diperdagangkan dan liabilitas tersebut jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang memiliki klasifikasi sebaliknya. Fungsi dari laporan posisi keuangan menurut PSAK 45 adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta mengenai informasi hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.

Dalam laporan laba rugi berisikan pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasional, laba usaha, pendapatan lain-lain, laba sebelum bunga dan pajak, bunga, laba sebelum pajak, pajak dan laba bersih. Fungsi dari laporan laba rugi menurut Kieso (2015) adalah menyajikan keberhasilan

operasi dan kemampuan perusahaan dalam mengolah kegiatan operasional entitas.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan asset selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran. Fungsi dari laporan perubahan ekuitas adalah sebagai sarana informasi mengenai kewajiban perusahaan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya yang membutuhkan.

4. Laporan arus kas selama periode

Dalam laporan arus kas terdapat informasi mengenai arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan pendanaan. Menurut PSAK (2016) No.2 fungsi laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai arus kas entitas yang berguna dalam menyediakan laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan

Berisikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan dan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan namun informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Fungsi dari catatan atas

laporan keuangan adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan digunakan oleh beberapa pengguna yang dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan diklasifikasikan oleh Kieso (2015) menjadi pengguna internal dan pengguna eksternal, pengguna internal seperti manajer menggunakan laporan keuangan untuk merencanakan strategi perusahaan dan dasar dalam pengambilan keputusan bagi keberlangsungan operasi entitas. Lalu pengguna eksternal yaitu individu atau organisasi di luar perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan. Pengguna eksternal seperti investor menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan dalam hal investasi, lalu kreditur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, otoritas pajak menggunakan informasi keuangan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan pada peraturan perpajakan yang

berlaku, badan pengawas menggunakan informasi keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan telah beroperasi sesuai peraturan yang berlaku,

konsumen berkepentingan untuk mengetahui kelangsungan usaha dan lini produk yang dihasilkan perusahaan serta serikat pekerja, menggunakan informasi keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan upah dan tunjangan kepada anggota serikat pekerja.

Berdasarkan Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 5 Juli 2011 (yang berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan), batas paling lambat:

- a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pengumuman dan/atau pemuatan dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik atas laporan keuangan tengah tahunan adalah pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan;
- b. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pengumuman dan/atau pemuatan dalam situs web emiten atau Perusahaan Publik atas laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan adalah pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Menurut panduan *go public* dari Bursa Efek Indonesia yang terdapat pada www.idx.co.id, laporan keuangan yang telah diaudit 3 tahun terakhir menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi perusahaan yang ingin

menjadi perusahaan terbuka, maka dari itu laporan keuangan yang telah di audit harus dilampirkan bagi setiap perusahaan.

2.2 Audit

Audit adalah akumulasi dan evaluasi dari bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen (Arens, 2017). Menurut Hayes (2017) audit adalah pendekatan sistematis. Audit mengikuti perencanaan yang terstruktur dan didokumentasikan (rencana audit). Dalam proses audit, catatan akuntansi dianalisis oleh auditor menggunakan berbagai teknik yang telah umum digunakan. Audit harus direncanakan dan disusun sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang melaksanakan audit dapat sepenuhnya memeriksa dan menganalisis seluruh bukti yang dinilai penting.

Menurut IAPI peraturan pengurus nomor 2 tahun 2016 tahapan pemberian audit sebagai berikut:

- a. Penerimaan klien dan evaluasi hubungan dengan keberlanjutan dengan klien, termasuk pemenuhan persyaratan prakondisi suatu audit, yang dituangkan dalam surat perikatan;
- b. Menyusun strategi dan rencana audit, termasuk:
 1. Melakukan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan

2. Menentukan respon atas risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan teridentifikasi.
- c. Melaksanakan prosedur sebagai respon atas penilaian risiko kesalahan penyajian material sebagaimana ditentukan pada huruf b, angka 2;
- d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan prosedur dan memformulasi simpulan dalam bentuk opini auditor independen;
- e. Mendokumentasikan seluruh tahapan audit dalam dokumentasi audit secara cukup dan memadai.

Dalam pelaksanaan audit terdapat fase-fase audit. Berikut merupakan 4 tahap fase audit menurut Hayes (2017):

1. Penerimaan klien

Kantor akuntan publik melakukan audit, baik untuk klien-klien yang sudah ada sebelumnya maupun klien-klien baru. Untuk klien-klien yang sudah ada sebelumnya, tidak banyak aktivitas yang dilakukan dalam penerimaan klien seperti audit tahun-tahun sebelumnya. Kantor akuntan publik telah mengenal perusahaan dengan cukup baik dan memiliki banyak sumber informasi untuk mengambil keputusan yang dapat diterima. Saat calon klien mendekati kantor akuntan publik perlu menginvestigasi terhadap latar belakang bisnis, laporan keuangan, dan tipe industri klien. Kantor akuntan publik juga perlu meyakinkan klien untuk menerimanya. Proses penerimaan klien termasuk melakukan audit, terhadap latar belakang klien, memilih personil yang

diperlakukan untuk melakukan audit, dan mengevaluasi kebutuhan dan persyaratan untuk melakukan pekerjaan profesional lainnya.

2. Perencanaan

Kantor akuntan publik harus merencanakan pekerjaannya untuk memungkinkan melakukan audit yang efektif dalam cara yang efisien dan tepat waktu. Rencana harus didasarkan pada pengetahuan terkait bisnis klien. Rencana-rencana dikembangkan setelah memperoleh pemahaman dasar terkait latar belakang bisnis, lingkungan pengendalian (*control environment*), aktivitas pengendalian (*control activities (procedures)*), sistem akuntansi klien dan setelah melakukan serangkaian prosedur analitis (*analytical procedures*), bagian kedua dari proses perencanaan adalah untuk menentukan sejumlah resiko audit penugasan dan menetapkan tingkat materialitas, terakhir, auditor menyusun rencana (*program*) audit (*audit plan (programme)*) yang menguraikan sifat dasar, waktu dan cakupan prosedur audit yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti.

3. Pengujian dan bukti

Fase pengujian dan pengumpulan bukti dalam audit, pertama-tama membutuhkan pengujian atas pengendalian yang mana auditor berharap dapat mengandalkannya. Saat pengendalian diuji, auditor harus menentukan uji substantif tambahan yang diperlukan. Pemahaman atas pengendalian

dibutuhkan untuk menentukan tipe (sifat dasar) pengujian, kapan (waktu) pengujian perlu dilakukan, dan jumlah (cukupan) pengujian yang diperlukan. Pengumpulan bukti audit harus memperoleh kecukupan bukti audit yang sesuai dengan melalui kinerja pengendalian dan prosedur-prosedur substantif (*substantive procedures*) untuk memungkinkan mereka mengambil kesimpulan yang memadai, yang akan menjadi dasar bagi opini auditnya.

4. Evaluasi dan pelaporan

Auditor harus meriviu dan menilai kesimpulan yang diperoleh dari bukti audit yang menjadi dasar bagi opininya atas informasi keuangan. Reviu dan penilaian ini mencakup pemberian kesimpulan secara menyeluruh terkait:

- a. Informasi keuangan telah disusun menggunakan kebijakan-kebijakan akuntansi yang berlaku dan diterapkan secara konsisten.
- b. Informasi keuangan sesuai regulasi yang relevan dan persyaratan yang ditentukan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Gambaran yang ditunjukkan oleh informasi keuangan secara keseluruhan konsisten dengan pengetahuan auditor terkait bisnis dari entitas.
- d. Terdapat pengungkapan yang memadai atas seluruh hal material yang relevan dengan penyajian informasi keuangan yang sesuai.

Setelah melakukan proses audit, auditor memiliki kewajiban untuk memberikan opini akan kewajaran dari laporan keuangan. Berikut merupakan opini kewajaran yang diberikan oleh auditor menurut IAPI (2017) dalam SPAP PSA 29 SA seksi 508:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan keuangan auditor yang berbentuk baku seperti yang diuraikan dalam paragraf 08.

2. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku.

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan dikecualikan.

4. Pendapat tidak wajar

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

2.3 Pertimbangan Tingkat materialitas

Material Menurut IAI (2016) pada PSAK 1 material adalah kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu. Materialitas menurut *Financial Accounting Standards Board FASB* dalam Arens (2017) besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi, yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut. Arens (2017) menyatakan salah saji dalam laporan keuangan dapat dinyatakan material apabila salah saji dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Terdapat tiga level dalam materialitas menurut Arens (2017), yaitu:

1. Jumlah tidak material

Ketika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi tidak mempengaruhi keputusan, ini dinyatakan tidak material.

2. Jumlah material tetapi tidak menyatakan laporan keuangan secara keseluruhan.

Ketika salah sajian dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan tetap disajikan dalam kewajaran.

3. Jumlahnya sangat material atau sangat meluas secara keseluruhan kewajaran laporan keuangan dipertanyakan.

Level tertinggi dari materialitas ada ketika pengguna kemungkinan membuat keputusan yang salah apabila berdasarkan keseluruhan laporan keuangan.

Menurut Hayes (2017) pertimbangan terkait materialitas dibuat dalam upaya menyoroti situasi sekitar, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan, dan dengan ukuran atau sifat dasar dari salah saji, atau kombinasi dari keduanya. Menurut *International Standards on Auditing (ISA)* dalam Hayes (2017) mengharuskan auditor melakukan pertimbangan secara profesional dan mempertahankan kewaspadaan profesional di seluruh perencanaan dan pelaksanaan audit, dan diantara hal-hal lainnya, seperti:

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, karena kecurangan atau kesalahan, berdasarkan pemahaman terkait entitas dan lingkungan entitas, termasuk pengendalian internal entitas.

2. Memperoleh kecukupan bukti audit yang sesuai terkait salah saji material yang ada, dengan merancang dan mengimplementasikan respons yang sesuai terhadap risiko-risiko yang telah dinilai.
3. Menyusun opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari bukti audit yang didapatkan sebelumnya.

Bukti audit menurut Halim (2015) adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan opini audit. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan klien. Untuk mendasari pemberian pendapat tersebut, auditor harus memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan tersebut. Menurut IAPI (2017) pada SPAP SA Seksi 326 bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja (*work sheet*) dan *spread sheet* yang mendukung alokasi biaya, perhitungan dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Selain itu bukti audit penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik, seperti cek; catatan *electronic fund transfer*; faktur; surat kontrak; notulen rapat; konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui; informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik; serta informasi lain.

Menurut Halim (2015) materialitas ditujukan untuk derajat signifikansi dari kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan bagi pengguna laporan keuangan. Auditor harus membuat pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan. Ada hubungan terbalik antara tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit yang diperlukan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Sebaliknya, jika tingkat materialitas tinggi, maka kuantitas bukti yang diperlukan sedikit. Tingkat materialitas yang ditentukan rendah berarti *tolerable misstatement* rendah. Rendahnya salah saji yang dapat ditoleransi menuntut auditor untuk menghimpun lebih banyak bukti sehingga auditor yakin tidak ada salah saji material yang terjadi.

Menurut Madali (2016) pertimbangan tingkat materialitas yaitu pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut yang dilihat berdasarkan pengetahuan tentang tingkat materialitas, seberapa penting tingkat materialitas, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit. Menurut Erfan (2013) pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan adalah pertimbangan yang dilakukan oleh seorang auditor terhadap laporan keuangan untuk menentukan seberapa besar salah saji yang terjadi dalam suatu laporan keuangan tersebut dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan IAPI (2017) SPAP SA seksi 312 menerangkan bahwa mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI. Risiko audit dan materialitas memengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentung baku. Risiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal lain, perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.

Menurut IAPI (2017) dalam SPAP SA seksi 312 pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau memengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan atas informasi tersebut. Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya

relatif kecil yang ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan.

2.4 Profesionalisme

Menurut Madali (2016) profesionalisme adalah tanggungjawab untuk berperilaku lebih dari sekedar untuk memenuhi tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme adalah sikap auditor dalam menjalankan profesinya yang dicerminkan dari totalitas dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai auditor (Erfan, 2013).

Dalam penelitian Syaravina (2015) sebagai profesional, auditor mempunyai kewajiban untuk memenuhi aturan perilaku yang spesifik yang menggambarkan suatu sikap atau hal-hal yang ideal. Kewajiban tersebut berupa tanggungjawab yang bersifat fundamental bagi profesi untuk memantapkan jasa yang ditawarkan. Menurut Oktavia (2015) seorang auditor harus bersikap profesional dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Untuk menunjang profesionalismenya, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang berlaku. Sementara menurut Sinaga dan Isgiyarta (2012) dalam Idawati dan Eveline (2016) sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesi

termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi.

Indikator profesionalisme auditor menurut Syahrir (2004) dalam Annisa & Wahyundaru (2013) yaitu:

- a. Pengabdian pada profesi. Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, jadi bukan semata mata karena materi tapi kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi
- b. Kewajiban sosial. Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
- c. Kemandirian. Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.
- d. Keyakinan profesi. Keyakinan terhadap peraturan profesi keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang

menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, buakan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

- e. Hubungan dengan rekan kerja. Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional

2.5 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Menurut Permana (2012) dalam Pratiwi dan Widhiyani (2017) pentingnya sikap profesionalisme seorang auditor dimaksudkan agar auditor dalam menjalankan pekerjaannya tetap mengacu pada nilai-nilai profesi seperti pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Auditor yang menjunjung nilai-nilai profesi tersebut, akan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan tingkat materialitas. Untuk menjalankan tugas secara profesional seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan. Termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang profesional akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan. Jadi semakin profesional seorang auditor, maka

pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat (Kusuma (2012) dalam Sarwini, Sinarwati dan Yuniarta (2014)).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syaravina (2015), Oktavia (2015), Idawati dan Eveline (2016), Pratiwi (2017), Madali (2016), Juniati dan Triani (2013), Sarwin, Sinarwati dan Yuniarta (2014) dan Muhammad (2014) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis penelitian, yaitu:

Ha₁: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.6 Etika Profesi

Etika profesi adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik (Madali, 2016). Dalam penelitian Syaravina (2015) dinyatakan etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya.

Etika profesi yang dinyatakan oleh Erfan (2013) dalam penelitiannya adalah karakteristik profesi yang mengatur tingkah laku atau komitmen moral para auditor dalam menjalankan atau mengemban profesi sebagai auditor yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang dibuat kode etik. Berperilaku

etis sesuai dengan etika profesi yang dianut menunjukkan bahwa seorang auditor tersebut dapat berkomitmen dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Perilaku etis merupakan hal yang paling mendasar dalam melakukan suatu pekerjaan segala sesuatu yang berawal dari kesadaran dan ketulusan dalam bekerja maka hasilnya juga akan lebih baik (Utami dan Adhi, 2014). Menurut Pratiwi dan Widhiyani (2017) etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara pada auditor, sehingga dapat memberikan pendapat audit yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Menurut Arens (2017) etika dapat didefinisikan secara luas sebagai satu set prinsip dan nilai moral. Berikut merupakan 6 etika menurut *Joseph Institute Associate* dalam Arens (2017):

1. Kepercayaan

Termasuk kejujuran, integritas, realibilitas dan loyalitas. Kejujuran membutuhkan niat baik untuk menyampaikan kebenaran. Integritas berarti seseorang bersikap berdasarkan hati nurani terlepas dari bagaimana situasinya. Reliabilitas artinya membuat seluruh usaha untuk terpenuhinya komitmen. Loyalitas adalah tanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi orang atau organisasi tertentu.

2. Menghormati

Menghormati termasuk kepada negara seperti kesopanan, adab, keasusilaan, martabat, otonomi, toleransi dan dukungan. Orang yang menghormati memperlakukan orang lain dengan ketenggangan dan penerimaan perbedaan individual dan mempercayai tanpa merugikan.

3. Tanggung Jawab

Berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang dan menahan diri. Tanggung jawab juga berarti mengejar keunggulan, menahan diri dan memimpin dengan contoh.

4. Kejujuran

Kejujuran dan keadilan termasuk masalah persamaan, bersikap adil, proporsionalitas, keterbukaan bersikap adil berarti situasi serupa ditangani dengan konsisten.

5. Peduli

Peduli berarti benar-benar peduli untuk kesejahteraan yang lain dan termasuk bersikap secara altruistik dan menunjukkan perbuatan baik.

6. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan termasuk menuruti hukum dan membentuk pembagian

Menurut IAPI (2017) seksi 100 salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap

praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi yang diatur dalam kode etik ini. Berikut merupakan prinsip dasar etika profesi:

a. Prinsip integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam menjalankan pekerjaannya.

b. Prinsip objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang baik layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

c. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*Professional competence and due care*)

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pekerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya

d. Prinsip kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

e. Prinsip perilaku profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi.

2.7 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Menurut Syaravina (2015) dengan diterapkannya etika profesi diharapkan seorang auditor dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi etika profesi dijunjung oleh auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas juga akan semakin tepat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syaravina (2015), Pratiwi (2017), Madali (2016), Juniati dan Triani (2013), Pratiwi dan Widhiyani (2017), Muhammad (2013) dan Sarwini, sinarwati dan Yuniarta (2014) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat

materilitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Nugroho (2014) bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis penelitian, yaitu:

Ha₂: Etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.8 Pengalaman Auditor

Menurut Asih (2016) dalam Kuncoro dan Ernawati (2017) pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun informal, atau dapat diartikan sebagai proses yang membawa seseorang kepada suatu polah tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Madali, 2016).

Menurut Juniati dan Triani (2013) pengalaman audit dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur tempat, waktu bekerja, keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor. Pengalaman auditor eksternal dapat diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya serta pengarahan dari auditor senior kepada juniornya. Auditor yang mempunyai pengalaman kerja yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi serta pemilihan bukti yang

relevan yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan untuk memberi kesimpulan mengenai pertimbangan tingkat materialitas yang dapat diandalkan (Yunitasari, Adiputra dan Sujana, 2014). Semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis industri (Sarwini, Sinarwari dan Yuniarta, 2014). Menurut Pratiwi dan Widhiyani (2017) pengalaman auditor juga sangat penting terkait dengan pertimbangan materialitas, karena pengalaman ini berkaitan dengan keahlian dan pengetahuan seorang auditor dalam menangani suatu kasus. Auditor bekerja untuk memeriksa kewajaran dari entitas klien, baik itu entitas bisnis, organisasi maupun lainnya, dan semuanya berkaitan dengan klien. Selain bukti-bukti yang relevan, dalam proses audit juga membutuhkan informasi-informasi yang dapat membantu jalannya pemeriksaan.

Berikut hierarki organisasi yang umum dalam kantor akuntan publik internasional menurut Hayes (2017):

1. Akuntan staf (atau asisten junior kemudian asisten senior)

Posisi pertama saat seseorang memasuki profesi akuntan publik adalah akuntan staf (disebut juga akuntan asisten atau akuntan junior). Akuntan staf sering kali melakukan tugas-tugas audit yang bersifat rutin dan lebih terinci.

2. Akuntan senior (atau supervisor)

Auditor senior (auditor yang bertanggung jawab) atau supervisor yang merupakan orang bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit dan umumnya memiliki pengalaman selama dua tahun atau lebih dibidang pengauditan publik.

3. Manajer

Manajer menyupervisi audit-audit yang dilakukan oleh auditor senior. Manajer membantu auditor senior merencanakan program auditnya, mereviu kertas-kertas kerja secara periodik, dan memberikan arahan/pedoman lainnya. Manajer bertanggung jawab untuk menentukan prosedur audit yang diterapkan untuk audit-audit tertentu dan untuk mempertahankan keseragaman standar pekerjaan lapangan. Sering kali manajer bertanggung jawab untuk menyusun dan mengumpulkan tagihan-tagihan perusahaan pada klien audit. Manajer, yang umumnya memiliki pengalaman setidaknya selama lima tahun, membutuhkan pengetahuan secara lebih luas dan terkini terkait hukum perpajakan, standar akuntansi, dan regulasi pemerintah. Seorang manajer kemungkinan memiliki spesialisasi terkait standar-standar akuntansi dari industri tertentu.

4. Rekan/direktur

Rekan adalah pemilik kantor akuntan publik. Perusahaan dalam struktur hukum yang membuat kata rekan di beberapa negara dulu dikenal sebagai direktur. Rekan banyak terlibat dalam perencanaan audit, evaluasi hasil-hasil, dan penentuan opini audit. Tingkat keterlibatannya dalam perencanaan audit, evaluasi hasil-hasil, dan penentuan opini audit. Tingkat

keterlibatannya dalam audit akan beragam antar perusahaan dan penugasan karena kantor akuntan publik harus memastikan bahwa rekan mengalokasikan waktunya dengan cara yang sesuai. Rekan akan medelegasikan sebanyak mungkin pekerjaannya kepada manajer dan akuntan senior yang berpengalaman. Selain itu, semakin besar akuntan publik, maka semakin banyak variasi yang mungkin terjadi di dalam praktik, yang bergantung pada sifat dasar penugasan.

2.9 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Menurut Sarwini, Sinarwati dan Yuniarta (2014) auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Kusuma (2012) dalam Sarwini, Sinarwati dan Yuniarta (2014) menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman seorang auditor maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017), Pratiwi (2017), Madali (2016), Juniati dan Triani (2013), Oktavia (2015) dan Syaravina (2015) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Nugroho (2014) pengalaman auditor tidak

berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis penelitian, yaitu:

Ha₃: Pengalaman Auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.10 Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan

Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis (Oktavia, 2015). Menurut Utami (2017) pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan adalah pengetahuan akuntan publik digunakan sebagai keefektifan kerja. Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif. Pengetahuan mendeteksi kekeliruan dapat diartikan ketika auditor memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan maka auditor memiliki pengetahuan mengenai bermacam-macam pola kekeliruan.

Berikut merupakan prosedur-prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas berdasarkan *ISA 315* dalam Hayes (2017):

1. Pengajuan sejumlah pertanyaan ke manajemen dan pihak-pihak lainnya dalam entitas.

Hal ini penting untuk didedikasikan dengan manajemen klien terkait tujuan-tujuan dan harapan-harapannya, dan beberapa rencana mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2. Prosedur-prosedur analitis.

Prosedur ini dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi sejumlah transaksi atau keadaan yang tidak biasa. Prosedur-prosedur analitis ini biasanya menyertakan perbandingan dari hasil-hasil perusahaan dengan yang ada dari satu industri yang sama.

3. Observasi dan inspeksi

Prosedur-prosedur ini dapat mencakup area yang cukup luas, mulai dari observasi terkait sejumlah aktivitas utama entitas, membaca laporan-laporan manajemen atau beberapa panduan pengendalian internal, sampai pada inspeksi yang dilakukan atas sejumlah dokumen. Kunjungan ke perusahaan menjadi dasar yang akan membantu auditor mengembangkan pemahaman yang lebih baik atas aktivitas bisnis dan operasi kliennya. Peninjauan ke beberapa fasilitas yang dimiliki perusahaan dapat membantu mengidentifikasi beberapa bentuk pengamanan pengendalian internal.

Pemahaman terkait entitas dan lingkungan entitas berdasarkan *ISA* 315 dalam Hayes (2017) membedakan aspek-aspek relevan berikut dalam pemahaman terkait entitas dan lingkungan entitas.

- a. Industri, regulasi, dan faktor-faktor eksternal lainnya, termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

- b. Sifat dasar dari entitas, termasuk penentuan dan pemberlakuan kebijakan-kebijakan akuntansi oleh entitas.
- c. Penentuan dan pemberlakuan kebijakan-kebijakan akuntansi oleh entitas, termasuk sejumlah alasan untuk mengubah kelayakan atas aktivitas bisnisnya dan konsistensinya dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- d. Tujuan-tujuan dan strategi-strategi, serta resiko-resiko bisnis yang terkaityang mungkin menghasilkan salah saji material pada laporan keuangan.
- e. Pengukuran dan rivi u kinerja keuangan entitas

Menurut Hayes (2017) pengendalian internal (*internal control*) tidak hanya penting untuk mengelola catatan-catatan akuntansi dan keuangan dari sebuah organisasi, tetapi juga untuk mengelola entitas. Setiap pihak mulai dari auditor eksternal, manajemen, dewan direksi, pemegang saham dari perusahaan dari perusahaan berskala besar yang sahamnya diperdagangkan untuk publik, sampai pemerintah juga memiliki kepentingan dalam pengendalian internal.

Dalam Hayes (2017) dijelaskan standar-standar internasional mewajibkan auditor untuk memperoleh pemahaman terkait pengendalian internal yang relevan untuk audit. Menurut ISA 315 dalam Hayes (2017) membedakan komponen-komponen pengendalian internal berikut:

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*).

- b. Proses penilaian resiko audit.
- c. Sistem informasi dan berkaitan dengan proses-proses bisnis yang relevan terhadap pelaporan keuangan dan komunikasi.
- d. Prosedur-prosedur pengendalian (*control procedures*).
- e. Pemantauan terhadap sejumlah pengendalian.

2.11 Pengaruh Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Untuk mampu mempertimbangkan tingkat materialitas dengan tepat, seorang auditor juga diharapkan memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan yang tinggi. Karena apabila auditor memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan yang tinggi akan lebih ahli dalam menungkapkan salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan (SM dan Bangun, 2017). Brown (1983) dalam Oktavia (2015) perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Semakin tinggi pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas (Noviyani dan Bandi (2002) dalam Oktavia (2015)).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017), Madali (2016), Muhammad (2013), Oktavia (2015) serta SM, Bangun dan Tarigan (2017) menyatakan pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis penelitian, yaitu:

Ha₄ : Pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.12 Independensi

Independensi adalah suatu cara pandang yang tidak memihak di dalam pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit (Utami, 2017). Menurut Mulyadi (2010) dalam Oktavia (2015) independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak tergantung pada orang lain. Menurut Murwanto (2008) dalam Yunitasari, Adiputra dan Sujana (2014) independensi merupakan suatu cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan.

Nilai audit sangat bergantung kepada persepsi publik mengenai independensi dari auditor. Alasan banyaknya beragam pengguna bersedia mengandalkan laporan CPA (*Certified Public Accountant*) adalah ekspektasi pengguna atas sudut pandang auditor yang tidak bias. Menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* dalam *code of Ethics for Professional* dan *International Ethics Standards Boards for Accountant (IESBA)* dalam *Code of Ethic for Professional* keduanya menjelaskan independensi terdiri dari dua komponen yaitu: *independence of mind* dan *independence appearance*. *Independence of mind* mencerminkan keadaan pemikiran auditor kemungkinan audit dilakukan dengan sikap yang tidak bias. Umumnya *independence of mind* dirujuk sebagai *independent of fact*.

Independence of appearance adalah hasil dari interpretasi independen. Apabila auditor independen dalam fakta tetapi pengguna laporan meyakini bahwa auditor berpihak kepada klien, fungsi dari nilai audit secara keseluruhan telah hilang (Arens, 2017).

Kode AICPA dalam Arens (2017) melarang anggota yang bertugas memiliki kepemilikan saham atau investasi langsung lainnya dalam klien yang sedang diaudit, terlepas dari materialitas karena berpotensi merusak independensi audit (*independence of mind*) dan tentunya ada kemungkinan untuk mempengaruhi persepsi pengguna terhadap independensi auditor (*independence in appearance*). Kepemilikan tidak langsung, seperti kepemilikan saham pada perusahaan klien seperti kakek nenek dari auditor juga dilarang.

Menurut IAPI (2017) dalam SPAP SA Seksi 220, standar umum menyatakan dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Independensi dalam SPAP memiliki arti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab sebagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak

memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

2.13 Pengaruh Independensi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Menurut Yunitasari, Adiputra dan Sujana (2014) dalam melaksanakan tanggung jawab audit suatu entitas, pemeriksaan mungkin menghadapi tekanan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi pemeriksa dalam mempertimbangkan tingkat materialitas, sehingga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan dan mempengaruhi auditor dalam menentukan jenis opini audit yang akan diambil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017), Syaravina (2015), Oktavia (2015), Yunitasari, Adiputra dan Sujana (2014) serta Idawati dan Eveline (2016) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis penelitian, yaitu:

Ha₅ : Independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.14 Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Auditor, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Independensi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Berdasarkan penelitian oleh Idawati dan Eveline (2016) menyatakan independensi dan profesionalisme berpengaruh secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2015) menyatakan profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan, independensi dan pengalaman berpengaruh secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian yang dilakukan oleh Yunitasari, Adiputra dan Sujana (2014) menyatakan independensi dan pengalaman kerja berpengaruh secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Natalisa SM dan Tarigan (2017) menyatakan profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan pengalaman auditor memiliki pengaruh secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.15 Model Penelitian

Model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian

